

# Pemkab Mamuju Maksimalkan Penganggaran Kepada Sejumlah Sektor Sesuai Arahan Pemerintah Pusat



Sumber foto:

[https://imgsrv2.voi.id/3U\\_x0nQK7RefqfNK8M4owjxYGxvLjsUHT4psDZn18MA/auto/1200/675/sm/1/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy8xMDk1NjIvMjAyMTEyMDEyMzAwLW1haW4uY3JvcHBIZF8xNjM4MzQOTE1LmpwZw.jpg](https://imgsrv2.voi.id/3U_x0nQK7RefqfNK8M4owjxYGxvLjsUHT4psDZn18MA/auto/1200/675/sm/1/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy8xMDk1NjIvMjAyMTEyMDEyMzAwLW1haW4uY3JvcHBIZF8xNjM4MzQOTE1LmpwZw.jpg)

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan mengoptimalkan penganggaran tahun 2022 kepada sejumlah sektor yang menjadi sasaran sesuai arahan dari pemerintah pusat. "Kami akan mengoptimalkan anggaran mulai dari peningkatan SDM hingga penanganan COVID-19," kata Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi Duka di Mamuju, Selasa.

Menurut Sutinah salah satu sasaran pada 2022 yakni akan meningkatkan SDM unggul sesuai program pemerintah Pemkab Mamuju optimalkan penganggaran sesuai arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Lantas pihaknya juga akan memaksimalkan kebijakan penanganan COVID-19 dengan memprioritaskan sektor kesehatan sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Menurut dia, Pemerintah Mamuju juga akan menjaga keberlanjutan program jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. "Selain itu pemerataan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan *zero-based budgeting*<sup>i</sup> agar belanja lebih efisien," katanya.

Ia menyampaikan kemudian APBD Mamuju 2022 akan diarahkan sesuai arahan pembangunan dari Presiden, "Pemkab Mamuju akan tetap menyesuaikan arah kebijakan nasional yang substansinya tertuang dalam APBN," katanya. Ia juga mengatakan Kabupaten Mamuju masih berupaya bangkit dari dampak bencana gempa bumi pada 15 Januari 2021, juga akan tetap berupaya mengoptimalkan perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Bupati Mamuju mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa pandemi COVID-19 masih akan menjadi ancaman bagi dunia pada tahun depan dan dapat menimbulkan ketidakpastian. "Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Jokowi menyatakan APBN 2022 harus dirancang secara responsif, antisipatif, dan juga fleksibel namun tidak mengganggu tata kelola keuangan yang baik untuk mencegah dampak ekonomi," katanya.

#### **Sumber:**

VOL.id, Pemkab Mamuju Maksimalkan Penganggaran Kepada Sejumlah Sektor Sesuai Arahan Pemerintah Pusat, 1 Desember 2021. <https://sulsel.voi.id/aktual/109562/pemkab-mamuju-maksimalkan-penganggaran-kepada-sejumlah-sektor-sesuai-arahan-pemerintah-pusat>

Antarnews.com, Pemkab Mamuju optimalkan penganggaran sesuai arahan pemerintah pusat, 30 November 2021. <https://www.antarnews.com/berita/2556725/pemkab-mamuju-optimalkan-penganggaran-sesuai-arahan-pemerintah-pusat>

#### **Catatan Berita:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pemerintah menyusun APBN untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Sesuai Pasal 26 UU Nomor 17 Tahun 2003, setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Sesuai Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sedangkan belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang-undang tentang APBN. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah, Pasal 30 Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

---

<sup>i</sup> ZBB merupakan metode penganggaran berdasarkan perkiraan tiap kegiatan tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya atau dengan kata lain penganggaran mulai dari nol. Sehingga segala alokasi yang disusun berdasarkan visi dan juga rencana program pada periode saat itu. Pengalokasian anggaran melalui konsep ZBB yang diusulkan pemerintah terbagi atas tiga kelompok jenis belanja, yaitu *basic spending*, *intervention (priority) spending*, dan *anticipatory spending*.

*Basic spending* pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus tersedia pada setiap K/L dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada *basic spending*, anggaran harus di standarisasi berdasarkan kegiatan, harga, serta wilayahnya. Bagi K/L yang tidak memiliki fungsi intervensi, maka hanya akan dialokasikan anggaran *basic spending*.

Selanjutnya, *intervention spending* merupakan belanja-belanja yang bersifat intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Jenis belanja ini akan dialokasikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan pengalokasikan ke masing-masing K/L serta evaluasinya akan dilakukan oleh Komite Penilai yang beranggotakan Kementerian Koordinator, Kemenkeu, serta Bappenas. Alokasi belanja intervensi berdasarkan proposal K/L yang berisikan rincian anggaran, target *output* dan *outcome*, rencana aksi, indikator baku, serta manajemen risiko.

Proses penganggaran menggunakan *Performance Based Budgeting*, yaitu Komite Penilai membuat indikator baku untuk penilaian agar alokasi sesuai kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara K/L dan sinkron pula antara pusat dan daerah. Sedangkan proses pelaksanaan anggarannya menggunakan *Result Based Execution*, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai.

---

Terakhir, *anticipatory spending*, yakni belanja yang disiapkan sebagai *buffer* untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan *anticipatory spending* harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh, ketika menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau adanya bencana alam/sosial, alokasi *anticipatory spending* dapat berfungsi sebagai *social safety net* untuk menjaga daya beli masyarakat. (Buletin APBN, Vol V, edisi 12, Juni 2020, Overview “*New Normal*” Kebijakan Belanja Negara melalui *Zero Based Budgeting*).